

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA CLUNGUP MANGROVE CONSERVATION (CMC)

Nuddin Harahab^{a*}, Harsuko Riniwati^a, Cholilah Amin Zulfaidah^b

^aAgrobisnis Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia

^bSosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

*Koresponden penulis : marmunnuddin@ub.ac.id

Abstrak

Ekowisata pantai merupakan kegiatan wisata pesisir yang dikembangkan dengan pendekatan konservasi dan memanfaatkan karakteristik sumberdaya pesisir sebagai destinasi wisata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di CMC. Metode analisis data menggunakan deskriptif analitik, metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang selanjutnya disajikan dalam bentuk bahasa atau naratif. Data hasil observasi dan wawancara dilakukan analisis dengan prinsip konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong terciptanya partisipasi adalah adanya insentif ekonomi atau peluang pendapatan. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata CMC masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, ekowisata, Clungup Mangrove Conservation.

Abstract

Coastal ecotourism is a coastal tourism activity developed with a conservation approach and utilizing the characteristics of coastal resources as a tourist destination. The purpose of this study is to analyze the factors that determine community participation in ecotourism management at CMC. Data analysis methods use descriptive analytics, this method is used to describe data that has been obtained through analytic processes which are then presented in the form of language or narrative. Data from observations and interviews were analyzed using conservation principles. The results of the study indicate that the driving factor for the creation of participation is the presence of economic incentives or income opportunities. While the level of community participation in CMC ecotourism management is still low and needs to be improved.

Keywords : Community participation, ecotourism, Clungup Mangrove Conservation

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam merupakan aset penting suatu negara dalam melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi. Sumberdaya alam selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa (*wealth of nation*). Salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang sangat penting adalah ekosistem mangrove dan terumbu karang. Terumbu karang dan mangrove memiliki fungsi yang

sangat besar bagi kehidupan manusia, baik fungsi fisik, ekologi maupun secara ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam

konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional atau wisata massal.

Ekowisata harus dibedakan dari wisata alam. Wisata alam atau berbasis alam mencakup setiap jenis wisata-wisata misalnya wisata pertualangan, ekowisata yang memanfaatkan sumber daya alam dalam bentuk yang masih asli dan alami, termasuk spesies, habitat, bentangan alam, pemandangan dan kehidupan air laut. Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Sejarah ekowisata tidak terlepas dari keberadaan lingkungan konservasi. Di India, hal tersebut diartikan sebagai wilayah perlindungan sumberdaya alam, di Eropa sebagai daerah berburu bagi bangsawan. Dalam sejarah modern, sastrawan George Catlin pada tahun 1832 menunjukkan pentingnya taman nasional, sebagai respon tersisihnya budaya lokal di Afrika Serikat. Akhirnya lahirlah taman nasional Yosemite di wilayah California untuk resort dan rekreasi publik. Dari kasus tersebut munculah berbagai taman nasional di berbagai negara sebagai landasan legal dalam rangka untuk pengembangan kawasan wilayah ekowisata [1].

Ekowisata sering disebut juga dengan sebutan *ecotourism* yang diartikan sebagai perjalanan wisata yang bertanggung jawab, jadi para wisatawan tidak hanya menikmati manfaat yang diberikan oleh sumberdaya yang ada namun para wisatawan juga dituntut untuk tetap menjaga kaidah konservasi yang ditujukan pada perilaku selama perjalanan wisata. Pada mulanya perjalanan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hanya dilakukan oleh para pencinta alam, namun seiring berjalannya waktu konsep ekowisata telah banyak dikembangkan. Ekowisata diharapkan tidak hanya memberikan manfaat

secara ekologi namun juga memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat [2].

Ekowisata adalah sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum. Meliputi wisata bahari, wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, atau perjalanan bisnis memperlihatkan bahwa ekowisata berpijak pada tiga kaki sekaligus, yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya [1].

Seiring dengan semakin berkembangnya niat konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka lahir definisi baru mengenai ekowisata yaitu suatu bentuk perjalanan wisata ke arah alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Selain itu ada juga tambahan dari definisi ekowisata yaitu perjalanan wisata alam yang menyertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan pelestarian ekologis. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan bawasannya ekowisata bahari atau ekowisata pesisir dan laut adalah wisata yang berbasis pada sumberdaya pesisir dan laut dengan menyertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekosistem pesisir dan laut [3].

Ekowisata bahari merupakan kegiatan wisata pesisir dan laut yang dikembangkan dengan pendekatan konservasi laut yang memanfaatkan karakter sumberdaya pesisir dan laut. Pengelolaan ekowisata bahari merupakan suatu konsep pengelolaan yang memprioritaskan kelestarian dan memanfaatkan sumberdaya alam dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan ekowisata tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan tetapi lebih daripada itu, yaitu mempertahankan nilai sumberdaya alam dan manusia. Agar nilai-nilai tersebut terjaga maka perusahaan ekowisata tidak melakukan eksploitasi sumberdaya alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan

budaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan dan psikologis pengunjung. Dengan demikian ekowisata bukan menjual tempat (*destinasi*) atau kawasan melainkan menjual filosofi. Hal inilah yang membuat ekowisata mempunyai nilai lestari dan tidak akan mengenal kejenuhan pasar [4].

Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Pengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan hutan mangrove sebagai tempat wisata yaitu ekowisata mangrove, menjadi salah satu solusi tepat untuk melestarikan dan meintegrasikan berbagai manfaat dan kebutuhan. Ekowisata adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pengembangannya selalu memperhatikan keseimbangan nilai-nilai. Oleh karena itu kebijakan pengembangan ekowisata dapat dilihat dari ruang lingkup kepentingannya dan selayaknya harus mengacu pada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada yaitu antara lain: (1) UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Lingkungan Hidup; (2) UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; (3) UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata; (4) UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (5) UU No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konservasi Keanekaragaman Hayati; (6) Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Alam di Zona Pemanfaatan kawasan Pelestarian; (7) Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; (8) Keputusan bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Parpostel No.24/KPTS-11/89 dan No.KM.1/UM.209/MPPT-1998 tentang peningkatan koordinasi dua instansi tersebut untuk mengembangkan obyek wisata alam sebagai obyek daya tarik wisata, (9) Permenpar No14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Selain itu dalam praktek dilapangan harus

mempunyai komitmen dalam penerapan prinsip-prinsip ekowisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di CMC.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir Kabupaten Malang Jawa Timur, tepatnya di kawasan Ekowisata Clungup Mangrove Conservation (CMC) Kabupaten Malang.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk memperkuat terhadap analisis pada masalah yang telah dirumuskan. Analisis terhadap keberadaan dan pengelolaan ekoswiata banyak peran dan pihak yang terlibat, namun demikian bagaimana mewujudkan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu ekonomi, ekolologi dan sosial. Oleh karena itu pada pengumpulan data memperhatikan tiga aspek tersebut. Proses pengumpulan data primer dalam penelitian pada dasarnya wawancara melalui panduan kuisisioner. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan demografi wilayah pesisir Kabupaten Malang, dan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan ekowisata. Sumber data sekunder diperoleh dari Bappeda Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Kantor Desa dan kelompok masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan.

Metode Analisis

Analisis data merupakan proses pengurutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat dianalisis. Dari proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang selanjutnya disajikan dalam bentuk bahasa atau naratif [5].

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, studi pustaka serta dokumentasi. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik ekowisata CMC di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Data yang dibutuhkan berupa gambar lokasi, letak geografis dan topografi, batas wilayah, kondisi umum wilayah setempat, serta sejarah wisata alam Clungup Mangrove Conservation. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor-faktor yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di CMC. Hal ini merupakan proses menganalisis dari informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, serta observasi digunakan untuk menyajikan dalam bentuk bahasa atau naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wisata Clungup Mangrove Conservation

Clungup Mangrove Conservation (CMC) didirikan seiring dengan lahirnya kelompok masyarakat “Bakti Alam Sendangbiru”. Kepedulian yang besar akan kondisi lingkungan pantai Clungup yang semakin memburuk, mendorong masyarakat Sendang Biru Kabupaten Malang membuat kelompok yang bergerak pada kegiatan konservasi lingkungan. Kelompok masyarakat “Bakti Alam Sendangbiru” terlahir dari POKMASWAS Pondok Dadap yang berdiri

pada tahun 2012. Pada awal berdirinya POKMASWAS Pondok Dadap beranggotakan 75 orang yang berasal dari masyarakat sekitar Sendangbiru. Kegiatan serta tugas POKMASWAS Pondok Dadap adalah melakukan pengawasan pantai, flora dan fauna, serta terumbu karang. Selain kegiatan tersebut para anggota juga saling bergotong royong untuk membuka akses jalan menuju ke pantai Clungup dan sekitarnya, melakukan penanaman pohon mangrove serta pohon-pohon yang memiliki akar kuat seperti mangga, durian, dan kelengkeng.

Pada awalnya pengelolaan, kawasan Clungup Mangrove Conservation diperkasai oleh pak Saptoyo pada tahun 2005 secara mandiri. Pak Saptoyo berusaha sedikit demi sedikit memulihkan ekosistem mangrove yang rusak. Pada tahun 1996 kondisi hutan yang berada pada sekitar pantai Clungup sangat memprihatkan, banyak pepohonan tumbang akibat ditebang, bukit-bukit yang gundul tanaman keras berubah jadi tanaman semusim.

Karena alasan lingkungan pak Saptoyo mengajak para tetangga untuk bergerak membenahi ekosistem yang sudah rusak. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai kegiatan konservasi merupakan biaya pribadi mulai dari bibit, sarana parasana, serta konsumsi. Tidak mudah untuk mengajak masyarakat lokal sadar akan kelestarian lingkungan. Sampai pada tahun 2012 terbentuklah POKMASWAS Pondok Dadap dengan anggota yang cukup banyak, dimana mereka semua bergotong royong untuk membangun pantai Clungup menjadi yang lebih baik. Baik dari fasilitas jalan, ekosistem mangrove, pantai Clungup dan Gatra, serta flora dan fauna yang ada di kawasan Clungup. Banyak para anggota yang berharap banyak dengan adanya perbaikan fasilitas di kawasan pantai Clungup, mereka berharap dapat membuka warung makan ataupun melakukan kegiatan perekonomian lain disekitar pantai, namun karena tujuan awal dari gerakan ini adalah kegiatan konservasi maka untuk kegiatan perekonomian juga dibatasi. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan membuat banyak dari anggota POKMASWAS Pondok Dadap mengundurkan diri serta banyak yang pasif, hingga pada tahun 2014 anggota dari

POKMASWAS Pondok Dadap hanya berjumlah 20 samapi 25 orang.

Dengan jumlah anggota 20 samapi 25 orang Pak Saptoyo mengusulkan untuk membentuk kelompok masyarakat Bakti Alam Sendangbiru. Kelompok ini lebih menfokusnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan konservasi lingkungan yang ada di pantai Clungup dan Gatra. Secara bertahap gerakan dari kelompok masyarakat Bakti Alam Sendangbiru membuka empat pantai lainnya yaitu pantai Mini, Sapana, Batu Pecah dan Tiga Warna. Karena fokus pengelolaan kawasan Clungup adalah konservasi maka pihak dari Bakti Alam Sendang Biru memberikan nama Clungup Mangrove Conservation (CMC). Pengelolaan yang baik dan mampu memberikan dampak yang sangat positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi mengantarkan Clungup Mangrove Conservation menjadi kawasan Ekowisata terbaik se Jawa Timur pada tahun 2014.

Clungup Mangrove Conservation merupakan area konservasi seluas 117 Ha yang terdiri dari 71 Ha Mangrove, 10 Ha terumbu karang, 36 Ha hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat Sendangbiru sebagai destinasi ekowisata. Clungup Mangrove Conservation sendiri terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbemanjing Wetan, Kabupaten Malang. Di dalam destinasi wisata, manajemen Clungup Mangrove Conservation mengelola 6 pantai yang terdiri dari pantai Clungup, pantai Gatra, pantai Sapana, pantai Mini, pantai Batu Pecah dan pantai Tiga Warna. Ke enam pantai tersebut dibagi menjadi 2 area konservasi, dimana pantai Clungup dan Gatra digunakan sebagai area konservasi mangrove, sedangkan pantai Sapana, Mini, Batu Pecah dan Tiga Warna digunakan untuk area konservasi terumbu karang.

Keenam pantai yang ada di Clungup Mangrove Conservation dibagi menjadi dua zona area konservasi yaitu zona konservasi inti dan zona konservasi pemanfaatan. Zona konservasi inti terdiri dari pantai Sapana, Pantai Mini, dan pantai Batu Pecah, yang mana di aera ini tidak dianjurkan ada aktivitas wisata yang berlebihan. Para wisatawan yang berkunjung di aera ini harus dengan

dampingan pemandu serta tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas atraksi wisata. Sedangkan zona konservasi pemanfaatan terdiri dari pantai Clungup, Gatra dan Tiga Warna, dimana di area ini diperbolehkan untuk melakukan kegiatan wisata dan juga ekonomi namun tetap memperhatikan kaidah konservasi lingkungan.

Area konservasi yang ada di CMC memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Destinasi wisata serta atraksi wisata yang ditawarkan menambah harga jual dari kawan wisata bahari CMC. Hutan mangrove yang menyatu dengan *landscape underwater conservation*, pemandangan hutan mangrove yang lebat serta hijau yang menyejukan mata, budaya setempat yang diangkat menjadi kelestarian alam, situasi yang tenang jauh dari keramaian menambah kedamaian siapa saja yang berkunjung di CMC. Lingkungan secara umum menunjukkan panorama pantai yang indah, pengunjung disuguhkan dengan deburan ombak besar serta hembusan angin yang menyejukan menambah rasa kenyamanan yang ada di pantai.

Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata Clungup Mangrove Conservation dilihat dari kreteria dan indikator partisipasi masyarakat pada prinsip-prinsip ekowisata. Pengelolaan ekowisata sejogyanya penerapkan prinsip-prinsip ekowisata, yang meliputi prinsip konservasi, partisipasi, edukasi dan rekreasi, ekonomi, dan kendali. Prinsip partisipasi dan indikator yang dipakai dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip Partisipasi dan Indikatornya.

Prinsip	Indikator
Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan pengembangan pariwisata suatu kawasan oleh pemerintah dan atau pelaku pasar terlaksana bersama masyarakat. Kegiatan pariwisata disektor pelayanan langsung dan penunjang serta lapangan kerja untuk masyarakat teridentifikasi. Pola pengaturan kesempatan berusaha dan pola insentif untuk masyarakat yang berusaha dalam kegiatan pariwisata terumuskan.

-
4. Keberdayaan masyarakat untuk menangkap peluang usaha bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya terbangun
 5. Kompetensi masyarakat untuk mengisi lapangan kerja terbentuk dan ditingkatkan.
 6. Tenaga kerja asal setempat terserap oleh pelaku pasar.
 7. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terangkat.
-

Berdasarkan Tabel 1 dan hasil pengamatan lapang, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat setempat pada pengelolaan ekowisata masih kurang optimal dibanding dengan kriteria. Pada beberapa indikator mengindikasikan adanya penyebab partisipasi masyarakat yang kurang, diantaranya masih kurangnya pola pengaturan usaha dan pola insentif untuk masyarakat yang berwirausaha di kawasan Clungup Mangrove Conservation. Hal ini terlihat dari belum adanya pengembangan wirausaha selain berdagang makanan berupa mie instan, serta belum adanya pola pembagian insentif antara pengelola dan masyarakat yang berwirausaha di kawasan CMC. Upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menyerapan lapangan kerja juga masih belum terlihat dalam pengelolaan CMC, baik berupa pelatihan berwirausaha maupun berupa modal. Menurut salah satu *crew* di CMC pernah diadakan pelatihan pembuatan produk dari buah mangrove, namun hanya dilakukan satu kali dan belum ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut. Sehingga keberdayaan masyarakat dalam mengkreasikan produk olahan baik dari mangrove maupun produk perikanan belum terlihat.

Skor yang dihasilkan dari pengamatan lapangan rata-rata mendapatkan skor 2 atau jika dihitung dengan rumus kesesuaian dengan prinsip ekowisata nilainya adalah 61,6% yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang sesuai terhadap prinsip ekowisata. Nilai skoring pada prinsip partisipasi ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai skoring partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata CMC

Indikator	Kriteria penilaian	Skor	Bobot	S*B
1. Keputusan pengembangan pariwisata suatu kawasan oleh pemerintah dan atau pelaku pasar terlaksana bersama masyarakat.	1. Sangat sesuai: melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam pengembangan ekowisata	3	0,042	0,126
	2. Sesuai : melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ekowisata			
	3. Kurang sesuai : kurang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pengembangan ekowisata			
	4. Tidak Sesuai : tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dalam pengembangan ekowisata			
2. Kegiatan pariwisata disektor pelayanan langsung dan penunjang serta lapangan kerja untuk masyarakat teridentifikasi.	1. Sangat sesuai : Kegiatan wisata menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui kegiatan wisata di sektor pelayanan langsung maupun penunjang dan masyarakat dapat aktif di dalamnya.	3	0,03	0,09
	2. Sesuai : Kegiatan wisata menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui kegiatan wisata di sektor pelayanan langsung maupun penunjang, serta tidak semua masyarakat aktif di dalamnya.			
	3. Kurang sesuai : Kegiatan wisata kurang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui kegiatan wisata di sektor pelayanan langsung maupun penunjang			
	4. Tidak Sesuai : tidak ada kegiatan wisata yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui kegiatan wisata di sektor pelayanan langsung maupun penunjang			
3. Pola pengaturan kesempatan berusaha dan pola insentif untuk masyarakat yang berusaha dalam kegiatan pariwisata terumuskan.	1. Sangat sesuai : adanya peraturan membuka usaha dengan membentuk pola pengaturan lokasi, dan jenis usaha, serta pemberian insentif yang terorganisir dengan pemberlakuan SOP dan teridentifikasi			
	2. Sesuai : adanya peraturan membuka usaha dengan membentuk pola pengaturan lokasi, dan jenis usaha, serta pemberian insentif yang terorganisir, namun belum ada SOP			

Article history:

Diterima / Received 19-12-2018

Disetujui / Accepted 24-07-2020

Diterbitkan / Published 31-07-2020

©2020 at <http://jfmr.ub.ac.id>

	3. Kurang sesuai : kurang adanya peraturan membuka usaha dengan membentuk pola pengaturan lokasi, dan jenis usaha, serta pemberian insentif yang terorganisir	2	0,03	0,06
	4. Tidak Seuai : tidak ada peraturan untuk membuka usaha, maupun pemberian insetif kepada pegawai.			
4. Keberdayaan masyarakat untuk menangkap peluang usaha bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya terbangun	1. Sangat sesuai : Masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang usaha dan di motivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan dan dapat teridentifikasi			
	2. Sesuai: masyarakat setempat mampu menangkap peluang usaha namun tidak ada motivasi untuk berusaha secara berlanjut			
	3. Kurang sesuai : masyarakat setempat kurang mampu menangkap peluang berusaha serta kurangnya motivasi untuk berusaha	2	0,035	0,07
	4. Tidak Seuai: masyarakat tidak berdaya menangkap peluang ber usaha			
5. Kompetensi masyarakat untuk mengisi lapangan kerja terbentuk dan tertingkatkan	1. Sangat sesuai : adanya program peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyerap lapangan kerja berupa pelatihan dan pendidikan yang teridentifikasi			
	2. Sesuai : adanya program peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyerap lapangan kerja dan belum teridentifikasi keberlanjutannya			
	3. Kurang sesuai : kurang adanya program peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyerap lapangan kerja serta belum ada keberlanjutan	2	0,03	0,06
	4. Tidak Seuai: tidak ada sama sekali program peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyerap lapangan kerja.			
6. Tenaga kerja asal setempat terserap oleh pelaku pasar	1. Sangat sesuai : Seluruh tenaga kerja Masyarakat lokal terserap menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara langsung maupun tidak langsung			
	2. Sesuai : Ada tenaga kerja dari masyarakat lokal yang terserap menjadi pelaku ekonomi kegiatan ekowisata	3	0,03	0,09
	3. Kurang sesuai : jumlah tenaga keraja asal setempat yang terserap kalah dengan jumlah tenaga asing yang terserap menjadi pelaku ekonomi kegiatan ekowisata			

	4. Tidak Sesuai: tidak ada tenaga kerja asar yang terserap oleh pelaku pasar			
7. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terangkat	1. Sangat sesuai : kesejahteraan masyarakat setempat terangkat melalui peningkatan pendapatan akibat adanya keterlibtan dalam aktifitas ekowisata serta dapat teridentifikasi			
	2. Sesuai : kesejahteraan masyarakat setempat terangkat melalui peningkatan pendapatan namun tidak hanya berasal dari aktifitas ekowisata	3	0,04	0,12
	3. Kurang sesuai : kesejahteraan masyarakat setempat terangkat melalui peningkatan pendapatan yang berasal dari sektor diluar ekowisata			
	4. Tidak Sesuai: pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat tidak terangkat akibat adanya aktivitas ekowisata			
				0,616

Masyarakat setempat terlihat kurang mampu menangkap peluang usaha yang ada disekitar kawasan ekowisata. Selain disebabkan oleh beberapa hal diatas, konsentrasi pengelolaan yang berfokus pada kegiatan konservasi menjadai salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Clungup Mangrove Conservation. Menurut dewan pendiri CMC, kurangnya perhatian dalam hal upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dalam menyerap tenaga kerja dalam hal ini pelatihan pembuatan produk olahan adalah karena pengelola masih berfokus pada kegiatan konservasi. Saat ini pengelola sedang berusaha mengganti lahan atau yang disebut dengan ganti garap lahan, dari masyarakat ke pengelola CMC. Hal ini untuk memperluas gerakan konservasi di CMC dan untuk ganti garap lahan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga untuk pengadaan pelatihan guna memberdayakan masyarakat setempat masih menjadi agenda yang belum segera terealisasikan.

Dalam hal pengelolaan kawasan ekowisata kurangnya program peningkatan kompetensi dalam menyerap peluang kerja, menjadi salah satu penyebab masyarakat setempat kurang aktif dalam berpartisipasi. Sesuai dengan pendapat *the ecotourism society* yang dikutip oleh Fandeli [6] salah satu kriteria ekowisata adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam perencanaan pembangunan ekowisata yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Kriteria ekowisata yaitu partisipasi masyarakat, pengelola harus menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata. Untuk menjalin hubungan kemitraan yang berkelanjutan tentu harus ada *give and take* antara pengelola dan masyarakat setempat yang saling menguntungkan. Sehingga akan ada dorongan baik dari pengelola maupun masyarakat setempat untuk terus mempertahankan kemitraan yang terjalin [7].

Meskipun demikian ada beberapa indikator dalam kriteria partisipasi yang sesuai dengan prinsip ekowisata. Misalkan kegiatan pariwisata menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat. Namun karena kurangnya keberdayaan masyarakat setempat menyerap peluang kerja yang ada menyebabkan lapangan kerja yang ada tidak terserap secara maksimal oleh masyarakat setempat. Sehingga peningkatan pendapatan serta kesejahteraan seolah-olah hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat yang selama ini aktif berpartisipasi dalam pengelolaan CMC.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata di CMC secara umum dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu: umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah [8]. Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi) [9].

Faktor yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi yaitu karakteristik individu dapat mempengaruhi aktivitas kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finansial [10]. Tingkat kemampuan seseorang berpartisipasi dalam suatu program ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalamannya, sedangkan tingkat kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini adalah penyelenggara program, yaitu sejauh mana penyelenggara memberikan ruang kepada sasaran program untuk berpartisipasi [11].

Dalam konsep ekonomi, tingkat pendapatan akan memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, karena mempengaruhi kemampuan finansial untuk berinvestasi dengan mengerahkan

semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Begitu juga dengan faktor lama tinggal seseorang dalam lingkungan pemukiman dan status kepemilikan lahan atau hunian akan mempengaruhi seseorang untuk bekerja sama dan terlibat dalam kegiatan bersama [12]. Demikian juga waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat juga dipengaruhi jenis pekerjaannya, banyak warga yang telah disibukkan oleh pekerjaan utama atau kegiatannya sehari – hari kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar [13].

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa faktor internal meliputi kemauan berupa sikap dan motivasi serta kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu. Sedangkan faktor eksternal berupa kesempatan yang mendorong individu untuk ikut berpartisipasi dalam program, berupa pemberian akses. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu: 1) adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi; 2) adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut; dan 3) adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Kemauan dan kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu ataupun kelompok. Sedangkan kesempatan lebih dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar diri pelaku. Tingkat kemauan ditentukan oleh faktor yang bersifat psikologis individu, seperti harapan terhadap manfaat program dan motivasi terlibat dalam program. Dorongan seseorang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan sangat tergantung pada besarnya harapan akan tercapainya tujuan tersebut [14]. Harapan

mendapatkan manfaat atau imbalan tertentu, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, merupakan sumber motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu, tingkat penguasaan informasi mengenai program merupakan faktor yang dapat menimbulkan kemauan seseorang untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata CMC masih perlu ditingkatkan. Factor pendorong terciptanya partisipasi adalah adanya insentif ekonomi atau peluang pendapatan. Saran yang bisa disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah pengelola memberikan kesempatan berusaha atau kesempatan bisnis di dalam area wisata. Oleh karena itu pengelolaan sentra oleh-oleh dan kuliner perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah membiayai jalannya penelitian ini, melalui dana PNBPFPIK.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nugroho, Iwan, 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar
- [2] Mulyadi. Edi Okik, Hendriyanto, F.Nur. 2009. Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol.1 Edisi Khusus. Jurusan Teknik Lingkungan Ftsp Upn “Veteran“ Jawa Timur.
- [3] Tuwo, Ambo, 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut.Surabaya. Brilian Internasional
- [4] Yulianda F. 2007. Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi.

- [Makalah]. Disampaikan Pada Seminar Sains Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- [5] Moleong, lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [6] Fandeli, C, Dan Muhklison (2000). *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [7] Priyono, Yesser. 2012. Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. *Jurnal Perspektif Arsitektur*.
- [8] Cohen, J. and Uphoff, N. (1977). Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation. New York: Cornell University.
- [9] Sunarti. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*.
- [10] Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [11] Arnstein, S. (1969). A Leader of Citizen Participation. *Journal of American Institute of Planner*, 4, 216– 224
- [12] Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Partisipasi Masyarakat Penghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni
- [13] Budiharjo, E., & Sujarto, E. (2009). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- [14] Lugiarti, E. (2004). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. Institut Pertanian Bogor